



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABUBAKAR
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 699423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/84 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA POLEWALI MANDAR , Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.671.946

F. HARTA LAINNYA Rp. 90.000.000

Sub Total Rp. 1.029.171.946

III. HUTANG Rp. 470.396.505

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 558.775.441

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.